

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA MABONTA
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sarjan Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum
Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

OLEH

Djihhan Patarioja
NIM: 15 0302 0002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA MABONTA
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sarjan Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum
Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

OLEH

Djihhan Patarioja
NIM: 15 0302 0002

Dibimbing Oleh :

1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***“Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)”*** ditulis oleh Djihan Patarioja, NIM 15 0302 0002, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 25 Januari 2019, yang bertepatan 19 Jumadil Awal 1440 H telah direvisi sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.H (Sarjan Hukum).

Palopo, 6 Maret 2019 M
29 Jumadil Akhir 1440 H

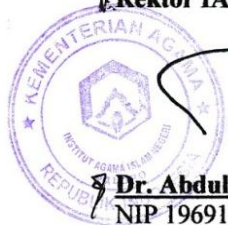
Tim Penguji

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Sekretaris (.....) |
| 3. Dr. Hj. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui,

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP 19691104 199403 1 004



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djihan Patarioja
NIM : 15 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Desember 2018


Djihan Patarioja

NIM:15 0302 0002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul *"Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)"*.

Yang ditulis oleh :

Nama : Djihan Patarioja
NIM : 15 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Desember 2018

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat, M.H

NIP.19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.H.L., M.HI

NIP.19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 18 Desember 2018

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Djihan Patarioja

NIM : 15 0302 0002

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

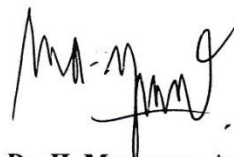
Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I :



Dr. H. Muammar Arafat, M.H.

NIP.19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 18 Desember 2018

Lamp :
Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Djihan Patarioja
NIM : 15 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

NIP. 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 19 Januari 2019

Lamp : :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Djihan Patarioja

NIM : 15 0302 0002

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji I



Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H
NIP.19540212 198203 1 010

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 19 Januari 2019

Lamp :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Djihan Patarioja

NIM : 15 0302 0002

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP.19701231 200901 1 049

PRAKATA



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : *“Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa”*, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku Ayahanda AKIB, Ibunda ISRA dan Nenek HAMSINA yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama

penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

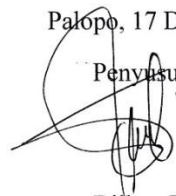
1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Rektor dan Staf Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.H selaku Pembimbing II masing-masing selaku pembimbing penelitian skripsi yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
5. Bapak Dr. H. M. Thoyyib Kaddase, M.HI selaku Penguji I dan Bapak Muh. Darwis, M.Ag selaku Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,S.HI selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing penulis.
7. Bapak Ibu Dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
8. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkhusus Pejabat Pemerintah Desa Mabonta yaitu Kepala Desa Mabonta, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Mabonta.
9. Kepada Sahabat penulis Diyan, Raodatul Jannah, Mita Juniar, A. Dinda Prasta, Novianti, Anggun Sari Sahid, Firmansyah, Heri Hermanto, Muh. Irfansah yang selalu memberikan bantuan, motivasi, semangat dan canda kepada penulis. Serta seluruh teman-teman angkatan 2015 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.
10. Semua pihak yang membantu dalam proses penelitian dan proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, 17 Desember 2018

Penyusun



Djihan Patarioja

Nim: 15 0302 0002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	v
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS PENGUJI I.....	vii
NOTA DINAS PENGUJI II	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Konsepsion	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Tinjauan tentang Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa	9
C. Pengertian Umum Desa	13
D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18

E. Kepala Desa	22
F. Kepemimpinan dalam Islam.....	26
G. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	31
H. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014	51
C. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam Perspektif Hukum Islam	53
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Mabonta.....	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2018	59
Tabel 4.2 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Pembangunan Desa 2018	64
Tabel 4.3 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Pembinaan Masyarakat Desa 2018	67
Tabel 4.4 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018	71
Bagan	Halaman
Bagan 2.1 : Pembagian Wilayah Desa	15
Bagan 2.2 : Kerangka Berpikir Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	36
Bagan 4.3 : Hubungan Kelembagaan Desa Mabonta.....	48
Bagan 4.5 : Struktur Pemerintahan Desa	49

ABSTRAK

Nama : Djihan Patarioja
Nim : 15 0302 0002
Jurusan : Hukum Tata Negara
**Judul : Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Desa**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Mabonta. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta. Penelitian ini dilakukan di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mabonta, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam perspektif islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Mabonta yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat Desa, menetapkan APBDes, Menetapkan peraturan Desa terkait dengan APBDes, dan membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat Desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Meskipun terjadi perubahan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang menggeser jumlah Desa menjadi kelurahan, namun dengan jumlah sekitar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di Desa.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam proses pembangunan.

¹Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Dipenogoro, 2018. h.1

Disebuah Desa terdapat Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan menyelenggarakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.² Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (1) diatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Desa. Sehingga seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Paradigma pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Desa dirubah dari yang “Dilayani” menjadi “Melayani”. Sikap Kepala Desa yang cenderung lebih ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin Desa.

Seorang pemimpin memiliki pembantu yang biasa disebut dengan staf. Staf merupakan seorang atau sekelompok orang yang saling bekerja sama membantu pemimpin yang memiliki keahlian, tanggung jawab dan professional

²Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari hal tersebut seharusnya sebagai pelaku penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa kata melayani secara berbelit-belit, lamba, dan penuh dengan pormalitas belaka.

Desa Mabonta merupakan salah satu dari delapan belas (18) Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masi pasif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa kesatuan dalam membangun desa dan kurangnya kesadaran Kepala Desa bahwa pemimpin merupakan mesin penggerak utama dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

Seorang Kepala Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab dan profesional selayaknya pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kepala Desa diharap mampu memberikan efek yang nyata serta dampak yang pasif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul *“Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)”*. Alasan penulis memilih topik ini dikarenakan masyarakat secara umum masih

sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa utamanya Kepala Desa yang masih kurang pengertian terhadap kebutuhan warganya tanpa masyarakat ketahui apa sesungguhnya tugas dan kewenangan dari Kepala Desa itu sendiri. Jadi penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi bagi masyarakat untuk memahami tugas dan kewenangan Kepala Desa.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan kewenangan dari Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?

C. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

D. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara terkait konsep implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat lebih mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan yang mengurus segala bidang di Desa tersebut.

b. Manfaat bagi Pemerintahan Desa

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam hal mengambil keputusan dan tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sebagai masukan untuk seorang Kepala Desa dalam membangun suatu pemerintahan harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan di desa tersebut.

E. Definisi Oprasional

Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini, maka definisi konsepsi dari skripsi ini yaitu :

1. Implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemerintahan atau swasta yang telah melakukan tahap perencanaan yang terarah dan teratur sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tugas adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan suatu jabatan atau organisasi tertentu guna menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan.
3. Kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau setiap subjek hukum dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala Desa adalah sebutan bagi pemimpin dari suatu desa yang ada di Indonesia dan diakui di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadil R. dengan penelitian yang berjudul “Fungsi Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gentung Kabupaten Pangkep)”.³ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada proses pengelolaan keuangan desa dimana peneliti menyertakan tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan Desa, menjelaskan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) pada penelitian terdahulu ini penelitian dilakukan di Desa Getung Kabupaten Soppeng. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, dan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam islam dan menyertakan beberapa Ayat dan Hadis terkait kepemimpinan.

³Muhammad Fadil R. berjudul “*Fungsi Kepala Desa dala pengelolaan Keuangan Desa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Gentung Kabupaten Pangkep)*”. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017.

b. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan keterhambatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Iqbal berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (studi kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)”.⁴ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

a. Penelitian terdahulu ini lebih berfokus pada pelaksanaan tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah. Penelitian terdahulu ini hanya membahas tugas dari Kepala Desa di Era Otonomi Daerah saja sehingga belum terlalu efektif dan juga membahas mengenai Good Government. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam Islam dan menyertakan beberapa Ayat dan Hadis menyangkut kepemimpinan.

b. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan keterhambatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Yulianto berjudul “Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Desa Tgalmlati Kecamatan Petarukan

⁴Muh. Iqbal, berjudul “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (studi kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*”. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

Kabupaten Pemalang).”⁵ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kinerja Kepala Desa dalam pelayanan publik di pemerintahan saja sehingga kurang efektif, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam Islam dan menyertakan beberapa Ayat dan Hadis menyangkut kepemimpinan.
- b. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan keterhambatan.

B. Tinjauan Umum tentang Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa.

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi atau biasa disebut dengan pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah yang secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pengertian implementasi atau pelaksanaan yaitu :

⁵Taufik Yulianto, berjudul “*Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Desa (studi kasus Tegalmilati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)*.” Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

1. Implementasi atau pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.⁶

2. Bernadine R. Widjaya & Susilo Suprado mengatakan bahwa implementasi merupakan proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.⁷

3. Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁸

4. Sabatier dalam Kadji mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁹

⁶Astrella Janice, Studi Tentang *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 2015.h.1462

⁷Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Budi Utama), 2015. h.43

⁸Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: Sah Media, 2017). h.121

⁹Erwin Zubair Gobel dan Yosef P. Koton, *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016). h.30-31

5. Iyyer dkk mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik.¹⁰

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemerintahan atau swasta yang telah melakukan tahap perencanaan yang terarah dan teratur sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pengertian tugas yaitu :

1. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Tugas dapat pula diartikan sebagai suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.¹¹

2. Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹²

3. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.¹³

¹⁰Ferry Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika), 2009. h.157

¹¹Anisa Yulawati, *Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Koperasi*, online, <http://annisayulia.blogspot.com>, 2 November 2012.

¹²Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 2015.h.1463

¹³Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 2015.1463

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan suatu jabatan atau organisasi tertentu guna menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan. Sedangkan pengertian kewenangan yaitu :

1. Menurut Jeffri Arlinandes, kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dala kewenangan itu.¹⁴

2. Menurut H.D. Stoud wewenang adalah *“Bevoegheid we kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”*. Bahwa wewenang sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁵

¹⁴M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Peraturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama 2018). h.58

¹⁵M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Peraturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama 2018). h.57

3. Wewenang atau kekuasaan yaitu “*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*” (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah).¹⁶

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau setiap subjek hukum dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian implementasi, tugas dan kewenangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu badan, subjek hukum atau organisasi tertentu dalam menjalankan suatu kegiatan secara berencana, terarah dan teratur guna mencapai suatu tujuan sesuai dengan sasaran dari program yang ditetapkan semula.

C. Pengertian Umum Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶Fadlul Taufiq dan Syafhendry, *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Universitas Islam Riau V.11 NO.1 2016. h.40

Apabila dilihat dari asal kata, Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu “deshi” yang berarti “tanah kelahiran”.¹⁷ Adapun pengertian desa menurut para ahli yaitu :

1. Menurut H.A.W. Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁸

2. Menurut Bambang Utoyo, mengemukakan bahwa Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.¹⁹

3. Menurut Ahmadi, Desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.²⁰

4. Menurut Rifhi Siddiq, Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencarian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.²¹

Adapun pengertian desa menurut Undang-Undang yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

¹⁷Kongres Pancasila IV, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 31 Mei-01 Juni 2012. h.329

¹⁸Suwanti, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara, 4 (1), 2016. h.2237

¹⁹Wikipedia, *Desa*, Online, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses 27 Oktober 2018.

²⁰Suwanti, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara, 4 (1), 2016. h.2237

²¹Hedi Sasrawan, *Pengertian Desa*, hedisasrawan.blogspot.com, online, Januari 2016.

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

3. Undang-Undang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

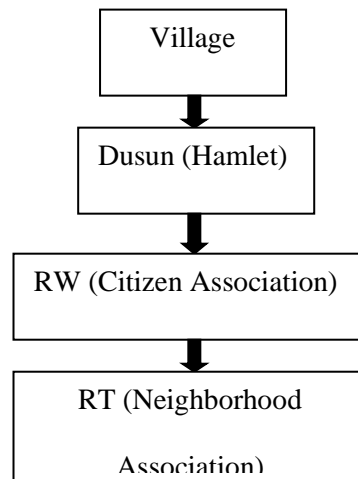
Menurut Kushandajani dalam hierarki sistem Pemerintahan di Indonesia, desa terletak di bawah Kabupaten, dan umumnya terbagi dalam dusun lalu dalam

²²Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

²³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangg (RT), sebagaimana dalam bagan berikut.²⁴

Bagan 2.1 : Pembagian Wilayah Desa



Sumber: Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Menurut Suhartono, ciri-ciri umum Desa yaitu: (1) Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris). (2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan. (3) Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya. (4) Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”. (5) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih

²⁴Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018. h.2

bersifat personal dalam bentuk tatap muka. (6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relative lebih ketat dari pada kota.²⁵

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa merupakan tindakan pengadaan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa :²⁶

1. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
3. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Desa, diantaranya :²⁷

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk yaitu :
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.

²⁵Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000). h.14.

²⁶Hukum Online, *Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa*, Online, <http://m.hukumonline.com>, diakses Kamis, 12 Januari 2017.

²⁷Hukum Online, *Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa*, Online, <http://m.hukumonline.com>, diakses Kamis, 12 Januari 2017.

- b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
- c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
- d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
- e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
- f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
- g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
- h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

3. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah.

4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.

5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

7. Saran dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

8. Tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.²⁸

D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan

²⁸Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur Pemerintahan Desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Desa Pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dan perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.³⁰ Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal, keagamaan dan partisipatif.

²⁹Republik Inonesia, Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁰Republik Inonesia, Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 19, kewenangan Desa antara lain meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Pasal 20 pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh Desa. Pada Pasal 21 pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (c) dan (d) diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Mengacu dalam Undang-Undang Desa Pasal 22 yang menyatakan :

1. Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah Kepala Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintahan, dan atau Pemerintahan daerah (biasa Pemerintahan Daerah Provinsi, biasa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yakni: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat penugasan tersebut disertai biaya. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Desa, yakni: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Hubungan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dengan aparat bersifat nominasi. Yang dimaksud dengan nominasi yaitu Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa menguasai sepenuhnya atau memegang kendali penuh atas aparat/perangkat Desa. Kepala Desa dalam fungsinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar sehingga dalam menjalankan amanah tersebut, Kepala Desa diberikan keringanan dengan adanya aparat yang akan bertugas untuk membantu Kepala Desa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

E. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebutan bagi pemimpin dari Desa yang ada di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sesuai ketentuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan Desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk sekali masa jabatan berikutnya. Adapun beberapa pengertian Kepala Desa yaitu :

1. Menurut Ny. Dra, Saparin, Kepala Desa adalah pemimpin organisasi Pemerintahan Desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat.³¹

2. Menurut Bayu Suriningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam Pemerintahan Desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan.³²

3. Menurut Sondang P. Siagaan, Kepala Desa adalah sebutan pemimpin Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin dari Pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu

³¹Muhammad Fathoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3 No. 1. h.140

³²Suwanti, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Administrasi Negara, 4 (1), 2016. h.2237

kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintahan tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, Kepala Desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggara Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintahan atasnya dan kebijakan Desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah daerah.³³

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin dari suatu lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah

³³Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi yang rumit, mengawasi dan sebagai saran penyalur perilaku masyarakat yang dipimpinnya serta sebagai juru bicara masyarakat yang dipimpinnya.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan pembangunan Desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pemerintahan, meliputi: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; (c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa; (d) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (e) mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dan kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

2. Fungsi regulasi, meliputi (a) Menetapkan APB Desa; (b) Menetapkan Perdes; dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa. Pembahasan dan penetapan peraturan Desa dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

3. Fungsi ekonomi, meliputi: (a) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (b) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Fungsi sosial, meliputi: (a) Membina kehidupan masyarakat Desa; (b) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (c) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

F. Kepemimpinan dalam Islam

Feisal menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah suatu hal yang inheren, ini merupakan salah satu sub sistem dalam Islam yang mencakup pengaturan seluruh aspek kehidupan secara principal. Dalam Islam seorang pemimpin dan yang dipimpin harus mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran yang dilaksanakan melalui pelaksanaan prinsip kepemimpinan, yaitu melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab seorang pemimpin dan melaksanakan hak berpartisipasi bagi yang dipimpinnya.³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 30 berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata,

³⁴Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis, Imperial Bhakti Utama 2007. h.238

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifa) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³⁵

Q.S Al-Baqarah di atas menjelaskan ketika Allah SWT berfirman kepada malaikat bahwa Allah SWT hendak menjadikan manusia (Adam) sebagai khalifa (pemimpin). Mengapa engkau menjadikan manusia (Adam) sebagai khalifah (pemimpin) padahal manusia pembuat kerusakan dan suka membunuh. Lalu Allah SWT menjawab “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Bahwa diantara keturunan manusia (adam) ada yang taat dan durhaka kepada Allah hingga terbukti dan tampaklah sebuah keadilan diantara mereka.

Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa” (4) ayat 59 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁶

³⁵Terjemahan Surah Al-Baqarah (2) ayat 30.

³⁶Terjemahan Surah An-Nisa (4) ayat 59

Ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Kriteria ini terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para Nabi sebagai pemimpin ummatnya, yaitu shidq, amanah, fatonah, dan tabliq. Selain empat sifat tersebut, ada syarat-syarat pemimpin dalam Islam lainnya yaitu :

1. Beragam Islam, beriman dan beramal shaleh. Pemimpin yang beragama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maaidah (5) ayat 51 berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُم فإِنَّهُ مِنهٖمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝٥١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”³⁷

Pemimpin yang beriman dan beramal shaleh selalu menjalankan perintah Allah dan rasulnya karena itu merupakan jalan yang menuju kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akhirat dan tidak lupa mengamalkan keimannya dalam bentuk amal shaleh.

2. Niat yang lurus, sesuai dengan yang di gambarkan hadis Nabi saw :

³⁷Terjemahan Surah Al-Maaidah (5) ayat 51.

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya...” (HR Bukhari & Muslim)³⁸

3. Laki-laki, dalam Al-Quran surah An Nisa ayat 34 telah diterangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nisa’ (4) ayat 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...”³⁹

4. Berpegang pada Hukum Allah, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maaidah (5) ayat 49 berikut :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka....”⁴⁰

5. Memutuskan perkara dengan Adil, Rasulullah saw bersabda :

“Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah dia akan diselamatkan oleh keadilan, atau dijerumuskan oleh kezhalimannya.”(HR Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).

³⁸Yoga Permana Wijaya, Kriteria Pemimpin Dalam Islam, Online, <http://www.google.com>

³⁹Terjemahan Surah Al- Nisa’ (4) ayat 34

⁴⁰Terjemahan Surah Al-Maidah (5) ayat 49.

6. Berlemah lembut, sesuai dengan doa Rasulullah saw :

“Ya Allah, barang siapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya”⁴¹

7. Tegak dan bukan peragu, Rasulullah saw bersabda :

“Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka.” (Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-hakim)⁴²

8. Bertanggungjawab, Rasulullah saw bersabda :

“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyatnya adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (HR. Abdul bin Umar ra.)⁴³

G. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

⁴¹Yoga Permana Wijaya, Kriteria Pemimpin Dalam Islam, Online, <http://www.google.com>

⁴²Yoga Permana Wijaya, Kriteria Pemimpin Dalam Islam, Online, <http://www.google.com>

⁴³Surusna, Pemilihan Kepala Negara Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Yogyakarta, Budi Utama, 2014. h.79.

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan seolah-olah organisasi ditarik mundur. Menurut Agus Dwiyanto, kinerja pelayanan publik di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :⁴⁴

1. Faktor Internal meliputi :

a. Sarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

b. Sumber Daya Manusia

Organisasi hidup di dalam lingkungan yang secara terus-menerus mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Untuk itu organisasi haruslah senantiasa melakukan uapay-upaya yang dapat memperkokoh keberadaannya di dalam lingkungannya. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan nilai tambah bagi lingkungannya melalui penyampaian berbagai *output* yang dihasilkan. Upaya ini memungkinkan sebuah organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten.⁴⁵

c. Koordinasi Antar Unit

Koordinasi merupakan suatu hal yang seharusnya dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menghasilkan tujuan suatu organisasi, koordinasi

⁴⁴Feby Riska Aulia, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2012.h.29-32

⁴⁵Feby Riska Aulia, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2012.h.30-32

dalam suatu organisasi hendaknya dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

2. Faktor Eksternal, meliputi :⁴⁶

a. Penggunaan Jasa

Berdasarkan pendapat Soebijanto dikutip Agus Dwiyanto bahwa, ”kadang kala pengguna jasa menghalalkan berbagai cara untuk menyelesaikan urusannya meski melanggar peraturan, seperti kasus pengurusan izin administrasi apa bila data tidak lengkap maka tidak diproses.

b. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi (dokumen) merupakan salah satu faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi itu sendiri.

c. Koordinasi dengan Instansi Lain

Koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain (pemerintah setempat) harus berkesinambungan karena suatu organisasi saling terkait oleh aturan-aturan, demi untuk peningkatan kinerja suatu organisasi.

Sedangkan dalam Harbani Pasolong, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, yaitu :

1. Kemampuan

Menurut Robbins kemampuan adalah suatu kepastian individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat

⁴⁶Feby Riska Aulia, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2012.h.32-34

dilihat dari dua segi (1) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

2. Kemauan

Menurut Robbins, kemauan atau motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (a) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan sebaiknya ada musik. (b) pengaruh lingkungan sosial yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh pegawai lain, pegawai lebih berbahagia apabila dapat menerima dan membantu pegawai lain.

3. Energi

Menurut Jordan E. Ayan, energi adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat.

4. Teknologi

Menurut Gibson teknologi adalah tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek

dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal, untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.

5. Konpensasi

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atau kinerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan tenang dan tekun. Akan tetapi bila pegawai merasa kompensasi yang diterimah jauh dari memadai, maka pegawai berfikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan tambahan di luar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir.

6. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien atau kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo yang mengatakan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kerjanya.

7. Keamanan

Menurut George Strauss dan Leonard Sayles keamanan kerja adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang mengatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari pada gaji atau kenaikan pangkat. Oleh sebab itu tidak cukup bagi seseorang dengan hanya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik mereka dari hari ke hari, tetapi mereka ingin memastikan bahwa kebutuhan mereka akan terus terpenuhi di masa yang akan

datang. Seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaan berpengaruh terhadap kinerjanya.

3. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat mendukung dan memudahkan terciptanya program kerja yang telah direncanakan. Adapun faktor pendukung yaitu berupa potensi anggota, kesempatan yang tersedia, dana, bahan dan alat, dan mitra kerja.

H. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.⁴⁷ Sugiyono menjelaskan, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara kritis pertautan antara variable yang diteliti.⁴⁸

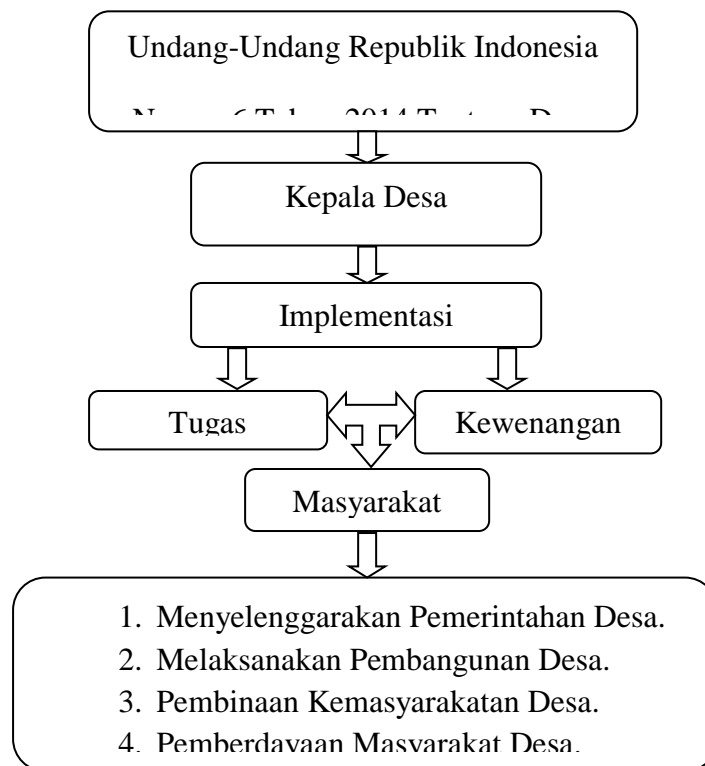
Rianse dan Abdi menjelaskan bahwa kerangka berpikir atau kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan-tinjauan pustaka dan landasan teori.⁴⁹ Adapun kerangka pikir di bawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini diterangkan dalam bagan berikut :

⁴⁷Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017). h.76

⁴⁸M. Muchson, *Metode Riset Akutansi*, Spasi Media 2017. h.60

⁴⁹M. Muchson, *Metode Riset Akutansi*, Spasi Media 2017. h.61

Bagan 2.2 : Kerangka Berpikir Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa aturan yang menyangkut tentang Kepala Desa itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. dengan aturan tersebut maka tugas dan kewenangan Kepala Desa akan terarah dalam artian jelas kedudukan kewenangannya sehingga terlaksana dengan baik sesuai aturan desa. dan apabila tugas dan kewenangan Kepala Desa telah terlaksana di lingkungan masyarakat maka dengan sendirinya perkembangan desa akan berkembang dengan pesat.

Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepala Desa itu sudah tertera dengan jelas kewenangan dan tugas kepala desa diantaranya

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. semua tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam mewujudkan good governance.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumen-dokumen, mengelolah data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Kepala Desa Mabonta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

⁵⁰ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018. h.149

C. Subjek Penelitian

Amirin mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵¹ Untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta, maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Mabonta selaku pemegang wewenang, aparat Desa dan masyarakat Desa Mabonta yang sekiranya nanti dapat membantu peneliti dalam menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Berupa data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta.

⁵¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017. h.152

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁵²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran kegiatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Kepala Desa.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada masyarakat, aparat Desa dan Kepala Desa. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Kepala Desa.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

⁵² Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018. h.103

F. *Analisis Data*

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵³

⁵³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018. h.52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Mabonta merupakan salah satu Desa dari 18 (delapan belas) Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Mabonta terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Mabonta, Dusun Lemo, dan Dusun Ujung Sidrap. Desa Mabonta yaitu Desa yang terletak pada daerah pesisir Teluk Bone yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wotu. Desa Mabonta merupakan pemekaran dari Desa Lambarese pada tahun 1990, pada saat itu masih berada pada wilayah Kecamatan Wotu dengan status Desa persiapan Mabonta, yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah saudara Alm. Kasim Dg. PasQWau dengan Sekertaris Desa saudara Tamsin, yang terdiri dari 5 (lima) Dusun, diantaranya adalah :⁵⁴

1. Dusun Mabonta yang dikepalai oleh saudara Makmur.
2. Dusun Lemo dikepalai oleh saudara Alm. Mustamin.
3. Dusun Ujung Sidrap dikepalai oleh saudara Labang.
4. Dusun Waetuo dikepalai oleh saudara M.Tayyong Dg. Gassing.
5. Dusun Kalatiri dikepalai oleh saudara Alm. Alib Bebang.

Pada Tahun 1997 Kepala Dusun Lemo meninggal dan digantikan oleh saudara Alm. Kambara melalui musyawarah. Pada Tahun 1999 Desa

⁵⁴Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta.

Mabonta menjadi Desa Depenitif, yang menjadi Kepala Desa adalah saudara A.M.Syaukani dengan sekertaris Desa adalah saudara Tamsin. Pada Tahun 2000 Kepala Dusun Lemo yaitu saudara Alm. Kambara mengundurkan diri dan digantikan oleh saudara Zainuddin melalui musyawarah. Pada Tahun 2003 Dusun Ujung Sidrap mengalami pergantian Kepala Dusun yaitu saudara Labang digantikan oleh saudara Mondin melalui Musyawarah dan Mupakat. Pada Tahun 2004 Dusun Kalatiri mengalami pergantian Kepala Dusun yaitu Saudara Alm. Alib Bebang digantikan oleh saudara Bunga Tator melalui pemilihan Kepala Dusun. Pada Tahun 2006 Sekertaris Desa Mabonta saudara Tamsin mengundurkan diri dari jabatannya digantikan oleh saudara Muhammad Abdi, S.T dan Dusun Mabonta dan Dusun Lemo mengalami pergantian Kepala Dusun yaitu saudara Makmur selaku Kepala Dusun Mabonta dan saudara Zainuddi selaku Kepala Dusun Lemo digantikan oleh saudara Mujerimin sebagai Kepala Dusun Mabonta dan Sofyan Musnurdin sebagai Kepala Dusun Lemo melalui Pemilihan Kepala Dusun.⁵⁵

Pada Tahun 2008 Kepala Desa Mabonta saudara A.M. Syaukani barkhir masa jabatannya digantikan oleh saudara Tamsin melalui pemilihan Kepala Desa dengan periode 2008-2014. Pada Tahun 2009 Kepala Dusun Ujung Sidrap saudara Monding digantikan oleh saudara Kalbu melalui musyawarah dan mupakat. Pada Tahun 2010 Desa Mabonta dimekarkan sehingga Desa Mabonta terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Mabonta, Dusen Lemo dan Dusun Ujung Sidrap. Sementara Desa pemekarannya adalah Desa Kalatiri terdiri dari 2 (dua)

⁵⁵Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta.

Dusun yaitu Dusun Kalatiri dan Dusun Waetuo. Pada Tahun 2014 Kepala Desa Mabonta berakhir masa jabatannya pada bulan Juli dan pejabat Kepala Desa adalah Muhammad Abdi, S.T (Sekertaris Desa). Pada Tahun 2015 Pemilihan Kepala Desa serentak pada bulan Oktober dan terpilih sabagai Kepala Desa Mabonta adalah saudara Hamansi.⁵⁶

2. Keadaan Umum Desa Mabonta

Desa Mabonta terdiri dari 3 dusun, yaitu :

1. Dusun Mabonta.
2. Dusun Lemo.
3. Dusun Ujung Sidrap.

Desa Mabonta berada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.⁵⁷

1) Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalatiri, Desa Lambarese dan Desa Benteng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balo-Balo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Burau Pantai.

2) Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Mabonta sekitar 10.075 km², yang terdiri dari areal persawahan, perkebunan, perikanan (budi daya ikan) dan sisanya adalah wilayah pemukiman penduduk.

⁵⁶Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta.

⁵⁷Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta.

3) Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Mabonta adalah daerah daratan rendah yang sebagian diantaranya merupakan rawah.

a. Iklim Desa Mabonta

Pada umumnya iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang mana iklim tersebut terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, begitu pula dengan keadaan iklim Desa Mabonta yang merupakan iklim tropis yang terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

4) Pendidikan

Pendidikan adalah hal utama dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimana sumber daya manusia memberikan pengaruh yang begitu besar pada perkembangan pemerintahan desa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan berpengaruh juga pada tingkat kecakapan masyarakat yang juga akan mempengaruhi kualitas individu, keterampilan, kewirausahaan, dan dapat membangun lapangan kerja baru bagi individu lainnya. Desa Mabonta memiliki 1 SDN (Sekolah Dasar Negeri). Bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri), SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) mereka harus melanjutkan di luar Desa Mabonta. Dan juga bagi sebagian lulusan SMAN yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti Kuliah dan Sekolah Pelayaran, mereka harus melanjutkan pendidikan ke luar Kota.

5) Mata Pencaharian

Penduduk Desa Mabonta sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani sebagian lagi penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan dan budi daya rumput laut, ada juga bekerja sebagai pegawai karyawan swasta.

3. Kelembagaan Desa

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara struktural pengurus BPD Desa Mabonta terdiri dari 5 orang. mereka merupakan perwakilan dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dari unsur pemuda. Olehnya itu penilaian dari masyarakat tentang kinerja BPD dianggap belum cukup bagus kinerjanya, masih perlu ditingkatkan dan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD.⁵⁸

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pengurus kelompok PKK di Desa Mabonta terdiri dari satu ketua, satu sekertaris, dan satu bendahara serta empat ketua pokja. Kelompok ini memiliki sepuluh tugas dan fungsi yang semuanya bertujuan mendorong dan meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sehubungan dengan tujuan dan fungsinya tersebut pengurus kelompok ini harusnya lebih intensif melakukan kegiatan di Desa berupa penyuluhan kesehatan, penanaman tanaman obat dipekarangan dan tidak hanya aktif di pelaksanaan arisan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

⁵⁸Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

Selama ini kelompok PKK di Desa Mabonta dinilai masih perlu meningkatkan kinerjanya agar kegiatan tidak hanya terlihat pada saat ada perlombaan desa dan pada saat 17 Agustus tapi harus kelihatan minimal setiap minggu ada agar ketua dan anggotanya yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja putri dengan karakter dan pendidikan yang berbeda-beda lebih bersemangat dalam pemberdayaan keluarga menuju keluarga yang sejahtera.⁵⁹

c. Guru Ngaji

Pembinaan TK-TPA di Desa Mabonta telah alam berjalan sebagai bentuk peningkatan masyarakat religious yang diharapkan membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Antusias masyarakat dalam lembaga ini sangat tinggi seiring dengan perencanaan pemberantasan buta huruf Al-Quran dan siswa baru yang mau masuk sekolah harus bisa baca Al-Quran.⁶⁰

d. Karang Taruna

Lemabaga ini sejak dibentuk pengurusnya sampai sekarang kinerjanya tidak kelihatan dan biasanya berkegiatan menjelang tanggal 17 Agustus saja.

e. Arisan PKK

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan dimana anggotanya adalah para ibu-ibu PKK. Kegiatan ini dinilai cukup bagus karena dapat mempererat hubungan silaturahmi antara ibu satu dengan yang lain. Disamping itu mereka juga dapat bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka peningkatan

⁵⁹Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

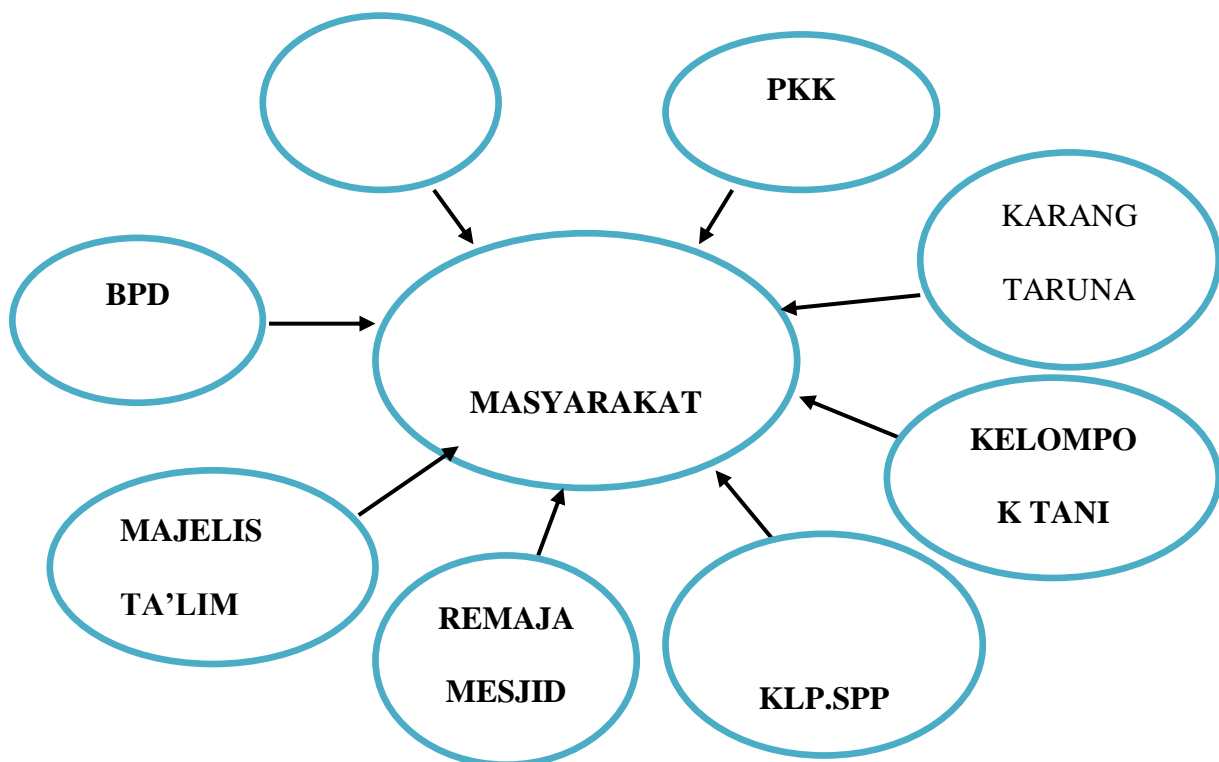
⁶⁰Pemerintaha Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

kesejahteraan keluarga. Hasil dari arisan PKK ini juga dapat membantu para ibu mengatasi problema ibu dalam rumah tangga khususnya bila ada pesta.⁶¹

f. Kelompok Tani

Saat ini kelompok tani di Desa Mabonta tidak berjalan efektif, ada juga kelompok ini sebatas proposal untuk mendapat bantuan, kurangnya pengetahuan petani tentang tujuan berkelompok, pada dasarnya keberadaan kelompok tani banyak membantu masyarakat dalam pengadaan saprodi meskipun diakui bahwa manajemennya meski perlu pembenahan agar kesejahteraan petani dapat terealisasi.⁶²

Bagan 4.3 : Hubungan Kelembagaan Desa Mabonta



Sumber : Pemerintah Desa Mabonta Tahun 2018

⁶¹Pemerintah Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

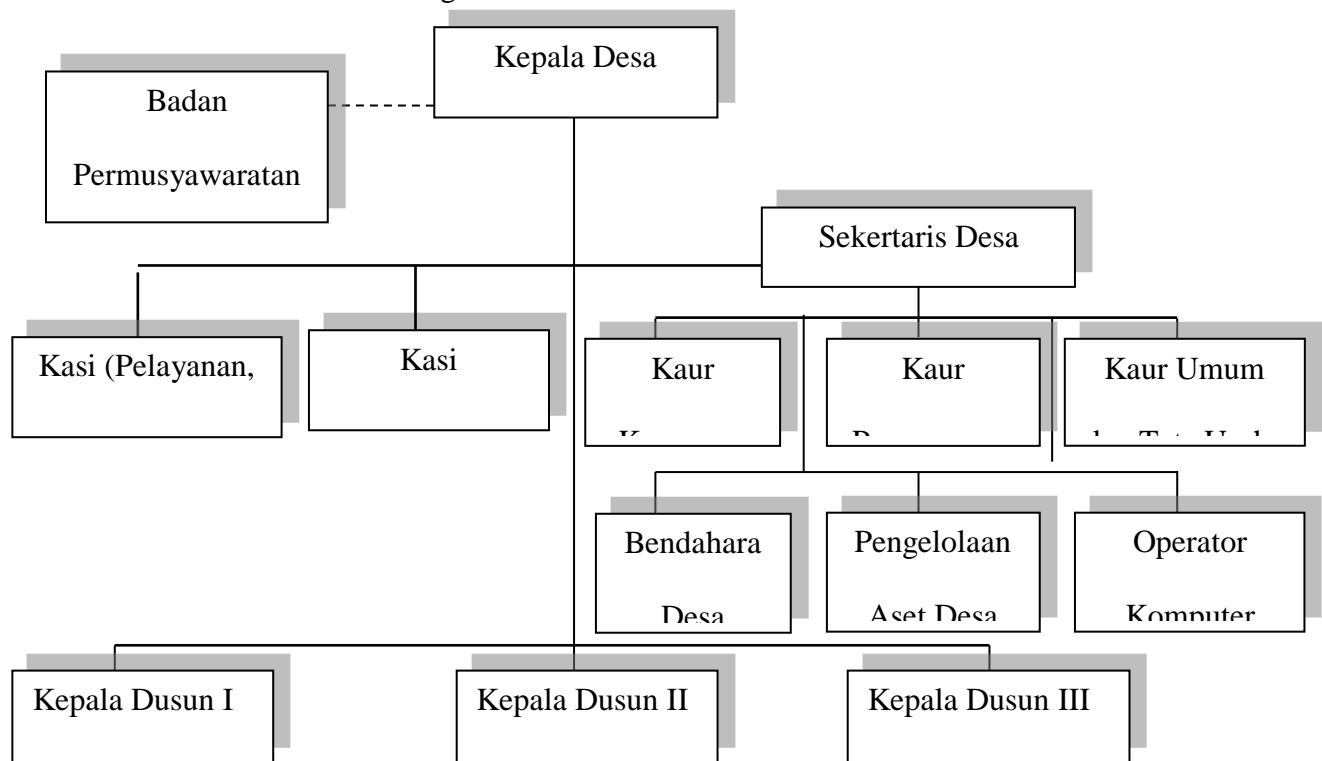
⁶²Pemerintah Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

Keberadaan lembaga desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintah melalui lembaga ini adalah untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

4. Struktur Pemerintahan Desa Mabonta

Berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 maka susunan struktur organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut.⁶³

Bagan 4.4 : Struktur Pemerintahan Desa



Keterangan :

———— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber : Pemerintah Desa Mabonta Tahun 2018

5. Visi dan Misi Desa Mabonta

⁶³Pemerintah Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Desa Mabonta yang aman, sejahtera, dan nyaman”.

Dimana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi dan misi tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa yang dilaksanakan secara musyawarah.⁶⁴

b. Misi

a. Mendorong masyarakat Desa Mabonta dalam kemajuan usaha kecil menengah;

b. Mengupayakan semaksimal mungkin tersedianya sarana produksi dalam menunjang pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat;

c. Menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat serta kekeluargaan;

e. meningkatkan peran generasi muda dan PKK dalam menunjang program.

⁶⁴Pemerintah Desa Mabonta, Profil Desa Mabonta

B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Tugas dapat pula diartikan sebagai suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.⁶⁵ Sedangkan Wewenang atau kekuasaan yaitu *“the power or right delegated or given; the power to judge, act or command”* (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah).⁶⁶

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :⁶⁷

5. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
6. Melaksanakan pembangunan Desa.
7. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
8. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :⁶⁸

- p. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- q. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- r. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

⁶⁵Anisa Yulawati, *Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Koperasi*, online, <http://annisayulia.blogspot.com>, 2 November 2012.

⁶⁶Fadlul Taufiq dan Syafhendry, *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Universitas Islam Riau V.11 N0.1 2016, h.40

⁶⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- s. Menetapkan peraturan Desa;
- t. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- u. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- v. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- w. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- x. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- y. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- z. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- aa. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- bb. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- cc. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- dd. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:⁶⁹

5. Fungsi Pemerintahan, meliputi: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; (c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa; (d) pemanfaatan

⁶⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

teknologi tepat guna; dan (e) mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dan kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

6. Fungsi regulasi, meliputi (a) Menetapkan APB Desa; (b) Menetapkan Perdes; dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa. Pembahasan dan penetapan peraturan desa dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

7. Fungsi ekonomi, meliputi: (a) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (b) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Fungsi sosial, meliputi: (a) Membina kehidupan masyarakat Desa; (b) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (c) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

C. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam

Perspektif Hukum Islam

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰ Desa merupakan

⁷⁰Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan Desa merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaana kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁷¹

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, kearifan lokal, keberagaman, dan pastisipatif.⁷² Kepala Desa adalah orang yang memimpin suatu Desa, berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.⁷³

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintaha Desa; melaksanakan pembangunan Desa; melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan memberdayakan masyarakat Desa;

⁷¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷³Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa dengan empat tugas Kepala Desa yang berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mabonta

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan atas asas kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, kerifan local, keberagaman, dan partisipatif. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan aparat Desa.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa:

dalam masa jabatan saya, yang saya lakukan selaku Kepala Desa beserta para aparat Desa selalu menjalankan tugas itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada baik itu Undang-Undang Desa dan visi dan misi Desa. Adapun kegiatan atau hal-hal yang ingin dibentuk dilakukan selalu melalui musyawarah seperti pembentukan peraturan Desa (Perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan kerja sama antara Desa itu dilakukan secara

*musyawarah bersama sengan aparat dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*⁷⁴

Menurut Iswar selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Mabonta mengatakan bahwa:

*Tugas Kepala Desa selama ini terlaksana dengan baik walau ada kendala-kendala yang dihadapi, dan kami itu selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan suatu keputusan harus melakukan musyawarah dulu, musyawarah yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa dan aparat Desa. Tujuan dari musyawarah ini yaitu untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Desa seperti pembangunan Desa, kemudian di cari solusinya bersama-sama. Begitu pula Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Desa wajib mensosialisasikan kemudian dilakukan musyawarah. Ketika suatu kegiatan terencana dengan baik maka hasilnya dapat sesuai dengan yang diharap.*⁷⁵

Menurut Dahri selaku tokoh masyarakat desa Mabonta mengatakan bahwa:

*kita sebagai masyarakat juga ikut dalam musyawarah, kita menyampaikan kendala-kendala atau masalah-masalah yang kita hadapi, kemudian kita mencari solusi yang baik. bersama dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat desa yang lain.*⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Visi dan Misi Desa Mabonta. Adapun Visi Desa Mabonta adalah “Terwujudnya masyarakat Desa Mabonta yang aman, sejahtera, dan nyaman” dan Misi Desa Mabonta adalah “Mendorong masyarakat Desa Mabonta dalam

⁷⁴Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

⁷⁵Iswar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mabonta, *Wawancara*, Kediaman Bapak Iswar tanggal, 29 November 2018

⁷⁶Dahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kediaman Bapak Dahri, tanggal 30 November 2018

kemajuan usaha kecil menengah; Mengupayakan semaksimal mungkin tersedianya sarana produksi dalam menunjang pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat; Menjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat serta kekeluargaan; meningkatkan peran generasi muda dan PKK dalam menunjang program”. Dan dalam menentukan suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah atau problematika yang ada di Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat Desa dan masyarakat melakukan musyawarah. Bermusyawarah dalam segala hal adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Artinya, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dalam pencapaian kesepakatan (mufakat). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran (3): 159 berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya :

“...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁷⁷

Hal yang ingin ditegaskan dari ayat di atas yang menurut anjuran dan perintah musyawarah dalam urusan manusia di dunia ini adalah bahwa Islam menjadikan sistem musyawarah sebagai pilar yang sangat penting dalam membangun peradaban umat manusia.

⁷⁷Terjemahan surah Ali Imran ayat 159.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud tersebut yaitu penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan aset Desa; dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁷⁸ Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termaksud masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud unsur masyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Hasil keputusan dari musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan Pemerintahan.

Menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

kita selaku aparat berusaha melakukan yang terbaik, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kami memperbaiki sarana-sarana

⁷⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*agar aparat Desa itu bisa menjalankan tugasnya dengan nyaman walaupun ada beberapa yang masi mau di benahi.*⁷⁹

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mabonta ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat Desa dalam menunjang kualitas Pemerintahan dan pelayanan di Desa Mabonta yang di terangkan di dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Adapun Kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2018.

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Realisasi
1.	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	295.320.000	APBDes	100%
2.	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	48.200.000	APBDes	100%
3.	Operasional Perkantoran	55.850.000	APBDes	100%
4.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9.470.000	APBDes	100%

⁷⁹Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

5.	Operasional Ketua RT	39.600.000	APBDes	100%
6.	Pelaksanaan Musrembang Desa	2.000.000	APBDes	100%
7.	Penyusunan Peraturan di Desa	2.000.000	APBDes	100%
8.	Kegiatan pengelolaan informasi di Desa	18.000.000	APBDes	100%
9.	Rehabilitasi Kantor	110.000.000	APBDes	100%
10.	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD	35.000.000	APBDes	100%
11.	Seleksi ketua dan anggota BPD	2.000.000	APBDes	100%
12.	Kegiatan sarana dan prasarana pelayanan	15.750.000	APBDes	100%
	Total :	633.190.000		

Sumber : Pemerintah Desa Mabonta Tahun 2018

Kepala Desa Mabonta wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur setiap tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatannya. Kepala Desa Mabonta juga menyampaikan

laporan penyelenggaraan setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah terlaksana. Dalam Islam seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin, hal ini dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyatnya adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (HR. Abdul bin Umar ra.)⁸⁰

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa di laksanakan oleh

⁸⁰Sutisna, Pemilihan Kepala Negara Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Yogyakarta, Budi Utama, 2014. h.79.

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.⁸¹ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸² Pemerintah Desa Mabonta menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan Desa menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa:

*dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mabonta kita laksanakan sesuai dengan Undang-Undang Desa. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Desa ada tahap-tahap yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan kita mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan melakukan musyawarah bersama mengenai pembangunan Desa, kemudian dilaksanakan, dan tahap terakhir yaitu pengawasan.*⁸³

Berdasarkan wawancara di atas, perencanaan pembangunan di Desa Mabonta Pemerintah Desa Mabonta menyusun sesuai kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka, yaitu rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja Pemerintah Desa, ini merupakan

⁸¹Republik Indonesia, Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

⁸²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸³Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018/

penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁸⁴ Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa Pemerintah Desa Mabonta menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan pembangunan Desa menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa:

*Dalam tahap pembangunan kami mengkoordinasi atau memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada perangkat Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat. Jadi kita saling bersosialisasi mengenai kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa. Dan mengenai pengawasan dan pemantauan, masyarakat berhak melakukan pengawasan dan pemantauan dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Mabonta, jika ada yang menjadi kendala, itu di bahas dalam musyawarah Desa.*⁸⁵

Berasarkan hal di atas menurut Dahri selaku Tokoh Masyarakat Desa Mabonta mengatakan bahwa :

*terkait dengan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Mabonta ini terbuka. Jika ada musyawarah kami diikutsertakan, tapi kadang-kadang ada masyarakat yang tidak ikut karena sedang bekerja, pergi ke sawah, atau pergi ke laut, biasa saya kuga seperti itu. Dan masyarakat Desa juga bisa mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.*⁸⁶

Menurut Akib selaku masyarakat Desa Mabonta mengatakan bahwa:

⁸⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸⁵Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

⁸⁶Dahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kediaman Bapak Dahri, tanggal 30 November 2018

*kalau ada pembangunan yang dilaksanakan di Desa ini, pasti kita selaku masyarakat ikut mengawasi. Seperti dalam penggunaan material, apakah material yang digunakan dalam pembangunan itu sesuai dengan yang digambarkan pada proses perencanaan.*⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas, pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Mabonta, Kepala Desa melakukan koordinasi atau memberikan informasi mengenai kegiatan pelaksanaan pembangunan dengan aparat Pemerintah, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa Mabonta. Masyarakat Desa Mabonta berhak melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Mabonta. Hasil dari pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, bahwa pemantauan tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, pembayaran upah, dan kualitas hasil pembangunan Desa. Adapun Kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Tahun 2018.

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Realisasi
----	----------------	-----------------	-------------	-----------

⁸⁷ Akib, Masyarakat, Wawancara, Kediaman Bapak Akib, tanggal 30 November 2018

1.	Penataan Wisata Pantai Lemo	70.000.000	APBDes	100%
2.	Pembuatan Pintu Air	45.450.000	APBDes	100%
3.	Pembuatan MCK (Septi Tang)	130.192.000	APBDes	100%
4.	Pengadaan Air Bersih	20.000.000	APBDes	100%
5.	Pembangunan Drainase	120.000.000	APBDes	100%
6.	Normalisasi Saluran Pembuangan	50.000.000	APBDes	100%
7.	Pengadaan Konstruksi Jalan Desa	40.000.000	APBDes	100%
8.	Plat Duecker	127.400.000	APBDes	100%
9.	Pembuatan Talud jalan Produksi	130.000.000	APBDes	100%
	Total :	733.042.000		

Sumber : Pemerintah Desa Mabonta Tahun 2018.

Berdasarkan kegiatan diatas pelaksanaan pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Mabonta yang berjalan adalah pembangunan fisik saja. Ini merupakan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat Desa yang dibahas pada musyawarah Desa bersama dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa dan masyarakat Desa Mabonta. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Mabonta, diharapkan Kepala Desa selaku pemimpin selalu memberikan suri tauladan yang

baik kepada masyarakat. Suri tauladan ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati rakyatnya. Sebagaimana dalam hadis Abu ja'la (ma'qil) bin jaras ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga.” (buchary, muslim)

3. Pembinaan Masyarakat Desa Mabonta

Pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan serta mengelolah lembaga dan sumber daya manusia agar bekerja lebih baik dan sesuai dengan harapan. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa yang dimaksud untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan Pemerintah, swasta dan warga Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menjelaskan mengenai pembinaan masyarakat. Tetapi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁸⁸

⁸⁸Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Sehubungan dengan pembinaan masyarakat Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa:

mengenai pembinaan masyarakat Desa Mabonta selama tahun 2018 ini masih kurang dan ini menjadi tugas kedepannya untuk meningkatkan pembinaan, hanya ada beberapa kegiatan pembinaan seperti pembinaan keamanan dan ketertiban, pembinaan pemuda dibidang olahraga, pembinaan ibu-ibu PKK, dan pembinaan kerukunan umat. Dalam pelaksanaan pembinaan ini saya selaku Kepala Desa dan aparat Desa mempunyai harapan yang besar misalnya dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, kami berharap agar keamanan dan ketertiban di Desa Mabonta ini bisa terjaga dengan baik. Pembinaan pemuda di bidang olahraga, kami berharap generasi mudah Desa Mabonta bisa menyalurkan bakat-bakat hebat mereka. Pembinaan Ibu-Ibu PKK itu di harap kaum perempuan di Desa Mabonta ini bisa menjadi perempuan-perempuan yang cerdas dan aktif disegala bidang demi kemajuan desa, ada juga pembinaan kerukunan ummat beragama. Di mana pembinaan ini diharapkan dapat menguatkan tali silaturahmi di antara masyarakat walaupun memiliki keyakinan yang berbeda.⁸⁹

Menurut Dahri selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

pembinaan yang dilakukan terkait dengan keamanan, pembinaan pemuda, pembinaan yang biasa dilakukan oleh kelompok ibu-ibu (PKK) dan juga pembinaan kerukunan umat beragama.⁹⁰

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam pembinaan adalah :

- a. Pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- c. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pembinaan Masyarakat Desa yang dilakukan kepada Masyarakat Desa Mabonta merupakan proses pembaharuan dan penyebarluasan informasi yang

⁸⁹Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

⁹⁰Dahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kediaman Bapak Dahri, tanggal 30 November 2018

diperlukan oleh masyarakat dalam membangun Desa Mabonta dan proses perubahan perilaku masyarakat yaitu berupa perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi lebih baik. Adapun Kegiatan di bidang Pembinaan Masyarakat Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Pembinaan Masyarakat Desa pada Tahun 2018.

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Realisasi
1.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	21.600.000	ABDesa	100%
2.	Kegiatan Pembinaan Pemudah dan Olahraga	12.800.000	APBDes	100%
3.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	16.500.000	APBDes	100%
4.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	13.200.000	APBDes	100%
	Total :	64.100.000		

Sumber : Pemerintah Desa Mabonta Tahun 2018.

Dari tabel III tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan masyarakat di Desa Mabonta bertujuan agar masyarakat Desa Mabonta dapat menjaga keamanan dan Ketertiban dalam bermasyarakat secara lebih baik lagi dan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan di kalangan masyarakat utamanya generasi muda agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan di Desa Mabonta agar menjadi lebih baik lagi tanpa merusak kerukunan diantara ummat beragama. Pembinaan kerukunan beragama ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kerukunan pada seluruh masyarakat, dikarenakan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dalam masyarakat.

Menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

Dalam pembinaan masyarakat Desa Mabonta, kami selaku aparat sangat mengharapkan kerja sama dengan masyarakat. Walaupun kami berusaha sebisa kami jika masyarakat tidak bisa menunjukkan kerja sama dengan baik, jelas sangat sulit dalam perubahan Desa⁹¹

Keberhasilan pembinaan masyarakat desa di Desa Mabonta sangat berpengaruh bagi partisipasi masyarakat. Kerjasama masyarakat dan aparat Desa sangat dibutuhkan dalam kelancaran aktivitas-aktivitas pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala desa dan aparat desa. Apabila diantara manusia dalam sebuah masyarakat memiliki semangat kerjasama yang besar, maka hal itu menjadi modal dalam kemajuan masyarakat karena kerjasama dan saling tolong menolong, dan itu menjadi kemajuan perkembangan bagi semua sisi dimasyarakat. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada kaumnya dalam mengerjakan pekerjaan selalu bekerjasama dengan orang lain dan ketika individu saling bekerjasama mereka akan memiliki hubungan kemasyarakatan, spirit persatuan yang akan menjaga mereka dari perpecahan sehingga Islam memandang

⁹¹Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

pentingnya kerjasama dalam masyarakat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 2 berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ.....

Terjemahnya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁹²

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Mabonta

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁹³ Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat Pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses pembangunan Desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kepastian dan kualitas sumber daya manusia di Desa.⁹⁴

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa,

⁹² Al-Qur'an dan Terjemahannya surah Al-Maidah ayat 2.

⁹³ Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹⁴ Thalia, *Apa yang Dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Online, bumdes.id, 11 Desember 2017

lembaga adat Desa, BUM Desa, forum kerja sama antar Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan birokrasi atau penguasa yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan sebuah kegiatan.

Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa:

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Mabonta berjalan sebagai mana mestinya, kita tahu bahwa pemberdayaan masyarakat itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan potensi masyarakat terkhusus di Desa Mabonta dan kami berharap selaku aparat dengan pemberdayaan ini masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pembangunan Desa.⁹⁵

Berhubungan dengan hal di atas, Dahri selaku Tokoh Masyarakat Desa Mabonta mengatakan bahwa:

mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa sudah berjalan cukup baik, kami sebagai masyarakat selalu diundang jika Pemerintah meelakukan sosialisasi, tapi terkadang masyarakat hanya sebagian saja yang ikut, kebanyakan saat sosialisasi dilakukan ada masyarakat yang sedang bekerja, pergi kebun, pergi sawah, ada yang pergi ke laut. Tapi sebagai masyarakat kita harus ikut membantu secara langsung supaya Desa kita ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.⁹⁶

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat Desa adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat

⁹⁵Hamansi, Kepala Desa Mabonta, Wawancara, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

⁹⁶Dahri, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kediaman Bapak Dahri, tanggal 30 November 2018

Desa. Adapun kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun 2018.

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Realisasi
1.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu BKB BKL BKR	32.663.000	APBDes	100%
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Paud dan TK Desa	13.912.000	APBDes	100%
3.	Kegiatan Perpustakaan minat baca di Desa	6.700.000	APBDes	100%
4.	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	26.320.000	APBDes	100%
5.	Penyertaan Modal BUM Desa	150.000.000	APBDes	100%
6.	Motor Sampah	20.000.000	APBDes	100%
7.	Pelatihan TPKD	5.000.000	APBDes	100%
8.	Pelatihan Komputer Perangkat Desa	5.000.000	APBDes	100%

9.	Pengadaan Tabung Kebakaran	3.000.000	APBDes	100%
10.	Penyelenggaraan Potensi Desa	10.000.000	APBDes	100%
11.	Pelatihan Satgas Penanggulangan Narkoba	9.470.000	APBDes	100%
12.	Pelatihan Satgas Penanggulangan HIV/HAIDS	9.470.000	APBDes	100%
	Total :	291.535.000		

Sumber : Pemerintah Desa Mabonta Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mabonta bertujuan agar Masyarakat Desa Mabonta memiliki kemauan, kemampuan dan kesadaran dalam melindungi, memelihara, mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Terdapat aspek-aspek penting dalam pemberdayaan dalam masyarakat yang meliputi peningkatan kapasitas personal dan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan serta tindakan yang terkait dengan kehidupan manusia. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal (8): 53 berikut :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

“yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak akan berubah keadaan suatu manusia jika bukan mereka yang berusaha untuk merubahnya. Sehingga pemberdayaan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mabonta.

5. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Mabonta

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa di bahas dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; Menetapkan peraturan desa; Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; Mengembangkan sumber pendapatan desa; Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna;

⁹⁷Terjemahan surah Al-Anfal (8) ayat 53

Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Sehubungan dengan Kewenangan Kepala Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai Kepala Desa, saya mempunyai wewenang dan wewenang saya itu di atur dalam Undang-Undang Desa. Ada beberapa wewenang saya yang sudah terlaksana, yaitu pada awal jabatan saya telah mengangkat aparat Desa yang baru yang saya rasa bisa bekerja sama dengan saya, yang kedua yaitu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kewenangan selanjutnya yaitu saya memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan menyusun rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁹⁹

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Mabonta bahwa selama masa jabatannya hanya ada beberapa kewenangan yang dijalankan, yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan menyusun peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Dewan Permusyawaratan Desa.

⁹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

⁹⁹Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

b. Mengangkat dan memberhentikan aparat Desa. Dalam kegiatan pengangkatan aparat desa merupakan salah satu tugas Kepala Desa secara mandiri, tidak ada campur tangan atau rekomendasi dari camat sedangkan dalam memberhentikan aparat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat mengenai pemberhentian aparat Desa, kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian aparat Desa dan rekomendasi itu dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian aparat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian Kepala Desa melakukan rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan perangkat Desa, Dewan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan camat/bupati.

d. Membina keamanan, kehidupan dan perekonomian masyarakat Desa. Dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tugas kepala desa dalam kegoiatan pembinaan masyarakat Desa, baik itu kegiatan keamanan, pembinaan kepemudaan, pembinaan organisasi perempuan dan pembinaan kerukunan ummat. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Ada beberapa kewenangan yang tidak dijalankan oleh Kepala Desa salah satunya yaitu menetapkan peraturan desa mengenai organisasi pemerintahan Desa, tata ruang dan pungutan dimana dalam pembahasan peraturan Desa dilakukan bersama-sama dengan Badan Permusyawwatan Desa.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan

Kepala Desa Mabonta

Kepala Desa merupakan pimpinan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sesuai ketentuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak mengatur kepentingan masyarakatnya dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa, Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh aparat Desa. Pelaksanaan tugas seorang Kepala Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas tersebut, begitu pula dengan Kepala Desa Mabonta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan yang digunakan selama proses kerja yang dapat menunjang terlaksananya suatu pencapaian yang diharapkan. Fungsi dari sarana dan prasarana adalah mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, hasil kerja lebih berkualitas, mempermudah pengguna dalam melayani dan timbulnya kepuasan bagi yang mempergunakan.

Sehubungan dengan faktor penghambat kinerja Kepala Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

Penghambat pertama itu sarana dan prasarana. Di kantor itu kita cuman punya 1 Komputer yang bisa kita gunakan, yang semestinya setiap aparat itu mempunyai komputer. Jadi kalau ingin melayani harus saling menunggu. Di kantor juga tidak ada aula pertemuannya, jadi kalau ada kegiatan musyawarah kita adakan di ruang tamu kantor yang ukurannya bisa menampung kira-kira kurang lebih 20 orang.¹⁰⁰

Sarana dan Prasarana sangat penting bagi proses pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Mabonta. Sarana dan prasarana dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Desa dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dari Kepala Desa Mabonta. Tetapi pada kenyataannya sarana dan prasarana di Desa Mabonta masih menjadi penghambat dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam usaha terlaksananya pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat didasari atas kemauan diri dimana masyarakat ikutserta dalam pembangunan atas keyakinan dan kesadaran diri mereka sendiri.

Sehubungan dengan faktor penghambat kinerja Kepala Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

penghambat ke dua yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat Desa, padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam proses pembangunan Desa. Saya sering mengajak masyarakat dalam berbagai kegiatan, misalnya

¹⁰⁰Hamansi, Kepala Desa Mabonta, Wawancara, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

*musyawarah, gotong royong dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan pembangunan Desa.*¹⁰¹

Berhubungan dengan hal di atas, Akib selaku masyarakat Desa Mabonta mengatakan bahwa :

*kami sering di ajak Pak Desa untuk ikut serta dalam kegiatan. Misalnya gotong royong, tapi hanya sebagian masyarakat yang ikut karena sebagian ada yang pergi ke laut, ke sawa atau kebun atau memiliki urusan lain jadi tidak sempat ikut.*¹⁰²

Berdasarkan wawancara tersebut, faktor penghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Mabonta adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa Mabonta dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa. Ini disebabkan karena masyarakat Desa yang sibuk dengan pekerjaan dan pada waktu malam mereka beristirahat sehingga masyarakat tidak sempat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa. Diharapkan agar Kepala Desa Mabonta dapat mencari solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Mabonta.

c. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan dan pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari semua organisasi. Dalam memilih sumber daya manusia harus dilakukan secara selektif agar apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Sehubungan dengan faktor penghambat kinerja Kepala Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

¹⁰¹Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

¹⁰²Akib, Masyarakat, *Wawancara*, Kediaman Bapak Akib, tanggal 30 November 2018

penghambat selanjutnya yang menghambat pelaksanaan tugas saya sebagai Kepala Desa itu adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor kemampuan dan keterampilan aparat maupun masyarakat masi kurang, dan adanya aparat yang kurang baik dalam menjalankan tugasnya. Saya mengikutsertakan para aparat-aparat Desa dalam bimbingan dan pelatihan, baik itu yang di adakan di kabupaten, atau provinsi agar sumber daya aparat Desa itu bisa meningkat lagi. Dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan Desa masi kurang, pada saat musyawarah Desa hanya sebagian masyarakat yang hadir. Rata-rata masyarakat di Desa ini hanya tammatan SMA, SMP, bahkan SD, hanya sebagian yang menempuh pendidikan Sarjan itupun yang bekerja di perkantoran atau menjadi seorang guru.¹⁰³

Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Mabonta adalah sumber daya manusia baik itu aparat Desa maupun masyarakat Desa. Kemampuan dan Keterampilan aparat dan masyarakat Desa Mabonta masih kurang, apa lagi kebanyakan dari masyarakat hanya tammat SMA, SMP, bahkan SD. Kepala Desa tidak akan mampu melaksanakan tugasnya tanpa aparat Desa dan kerja sama dengan masyarakat. Kepala Desa Mabonta akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada melalui bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dan aparat.

2. Faktor Pendukung

a. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan seorang pemimpin tidak dapat

¹⁰³Hamansi, Kepala Desa Mabonta, Wawancara, Kantor Desa Mabonta, tanggal 29 November 2018

menjalankan tugasnya, karena hanya dengan kewenanganlah seorang pemimpin berhak memerintah orang lain.

b. Kewibawaan

Kewibawaan dapat diartikan sebagai suatu kualitas pada diri seorang individu yang dapat membuat orang lain menjadi tertarik, bersikap mempercayai, menghormati dan menghargai secara ikhlas dan akan mengikutinya. Sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Kewibawaan seorang pemimpin tidak hanya terlihat pada saat mengambil keputusan, tetapi juga pada saat seorang pemimpin dapat mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sehubungan dengan faktor pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa, menurut Hamansi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

Dalam menangani suatu masalah apalagi dalam menentukan suatu keputusan, kita itu harus mampu mengendalikan diri biar tidak terbawa emosi. Apa lagi pada saat yang lain dalam kondisi emosi lalu kita juga ikut emosi kan itu tidak baik, jadi sebagai pemimpin selayaknya kita mampu mengendalikan diri.¹⁰⁴

Apabila seorang pemimpin dapat mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka pemimpin tersebut memiliki kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.

c. Tanggung Jawab

¹⁰⁴Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 12 Januari 2019

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi tertentu.

Sehubungan dengan faktor pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa, menurut Hamnsi selaku Kepala Desa Mabonta mengatakan bahwa :

*dari awal menjabat, saya menjalankan tugas sebagai Kepala Desa ada rasa yang tidak boleh saya hilangkan dari diri saya, rasa itu adalah tanggung jawab. Jika seorang pemimpin sudah kehilangan rasa tanggung jawab, maka sudah tidak ada harapan.*¹⁰⁵

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Mabonta bahwa dalam menjalankan tugas rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya tidak boleh hilang. Pemimpin yang memiliki tanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berpikir taktis untuk menerima segala resiko yang timbul dari keputusan yang diambil.

¹⁰⁵Hamansi, Kepala Desa Mabonta, *Wawancara*, Kantor Desa Mabonta, tanggal 12 Januari 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab berkaitan dengan Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa, maka di tarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Tugas dan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa; melaksanakan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; menetapkan peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; Mengembangkan kehidupan sosial

budaya masyarakat Desa; Memanfaatkan teknologi tepat guna; Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan tugas dan kewenanga Kepala Desa Mabonta sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Mabonta yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti pelaksanaan Musrembang Desa dan penyusunan peraturan Desa; pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan drainase, pembuatan MCK, pengadaan air bersih, dan fasilitas pelayanan masyarakat; pembinaan masyarakat Desa seperti pembinaan keamanan, pembinaan pemudah, pembinaan organisasi perempuan, dan pembinaan rumput ummat beragama; dan pemberdayaan masyarakat Desa seperti penyertaan modal BUMDes, pelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kepala Desa Mabonta menjalankan beberapa kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan meberhentikan aparat Desa, menetapkan APBDes, Menetapkan peraturan Desa terkait dengan APBDes, dan membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat Desa, dalam hal ini Kepala Desa hanya membuat peraruran Desa terkait dengan APBDes saja tetapi tidak dengan peraturan Desa mengenai organisasi Pemerintahan Desa, tata ruang dan pungutan.

3. Faktor penghambat an pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta adalah, faktor penghambat pertama, sarana dan parsarana yang masih kurang dalam menunjang segala aktifitas melayani dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Mabonta. Kedua, partisipasi masyarakat yang sangat kurang dalam segala kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan pembangunan Desa Mabonta. Ketiga, sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memadai baik masyarakat maupun aparat Desa. Faktor pendukung pertama, kekuasaan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas. Kedua, kewibawaan seorang pemimpin dalam menghadapi suatu masalah dan dalam mengambil sebuah keputusan. Ketiga, tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan tugas. Faktor pendukung yaitu pertama, kekuasaan, kedua, kewibawaan yaitu suatu kualitas pada diri seorang individu yang dapat membuat orang lain menjadi tertarik, bersikap mempercayai, menghormati dan menghargai secara ikhlas dan akan mengikutinya. Ketiga, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi tertentu.

B. Saran

Saran merupakan bentuk pertanggung jawaban penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini Adapun saran yang diberikan penulis antara lain :

1. Untuk Pemerintah Desa sebaiknya harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Mabonta, yaitu aparat desa dan masyarakat.

Terbatasnya sumber daya manusia ini dapat diatasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi aparat dan masyarakat. Karena keberhasilan jabatan seorang Kepala Desa juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang memadai.

2. Untuk masyarakat Desa Mabonta, seharusnya ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan masyarakat harus aktif dalam memberikan kritik dan saran agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas tanpa ada yang dirugikan dan diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Chandra, M. Jeffri Arlinandes. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Peraturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama 2018).
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Feisal, Jusuf A. *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press..1995).
- Ferry, Efendi dan Makhfudli. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika), 2009.
- Gobel, Erwin Zubair dan Yosef P. Koton. *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Jeffri, M. Arlinandes Chandra. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Peraturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004.
- Kushandajani. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.
- Kongres Pancasila IV, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 31 Mei-01 Juni 2012.
- Muchson, M., *Buku Ajar Metode Riset Akutansi*, Spasi Media 2017.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana 2017.

Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.

Sulila, Ismet. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

Sore, Udin B. dan Sobirin. *Kebijakan Publik*, Makassar: Sah Media, 2017.

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*, Imperial Bhakti Utama 2007.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018.

‘Ied Al-Hilali, Syaikh Salim bin. Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005.

Jurnal & Skripsi :

Fathoni, Muhammad. Suryadi, Stefanus Pani Rengu. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3 No. 1.

Janice, Astrella. *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 2015.

Suwanti, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara, 4 (1), 2016.

Taufiq, Fadlul dan Syafhendry. *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Universitas Islam Riau V.11 N0.1 2016.

Burahman, Muji. *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa periode 2010-2016*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Fadi R, Muhammad, berjudul "*Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Gentung Kabupaten Pangkep*". Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017.

Iqbal, Muh., berjudul "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng*". Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

Riska, Feby Aulia. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2012.

Yulianto, Taufik, berjudul "*Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*". Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

Artikel :

Faldazata Ruhay, *Hadis*, Online, faldazataruhay.blogspot.com, Rabu, 27 Agustus 2014

Hukum Online, *Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa*, Online, <http://m.hukumonline.com>, diakses Kamis, 12 Januari 2017.

Wikipedia, *Desa*, Online, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses 27 Oktober 2018.

Yuliyawati, Anisa. *Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Koperasi*, online, <http://annisayulia.blogspot.com>, diakses 2 November 2012.

Thalia, *Apa yang Dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Online, bumdes.id, 11 Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno Hatta Telp. 081 234 577 756

Website: kppt-luwutimurkab.go.id Email: kppt@luwutimurkab.go.id

MALILI, Kode pos 92981

Nomor : 265/DPMPSTP/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Malili, 27 November 2018
K e p a d a
Yth. Desa Mabonta Kec. Burau
Kab. Luwu Timur
D i -
T e m p a t

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah Nomor : 494/In.19/F.Sya/11/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data.

Dengan ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **DJIHAN PATARIOJA**
Nomor Pokok : 15 0302 0002
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 10-11-1998
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat :

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Instansi Bapak / Ibu dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA MABONTA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR)”.**

akan dilaksanakan dari : 27 November s/d 27 Desember 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Melaporkan hasilnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Tembusan , Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Dinas Pendidikan Luwu Timur di Malili;
4. Dekan IAIN Palopo di Tempat;
5. Sdr. (i) **DJIHAN PATARIOJA** di Tempat.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 39 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

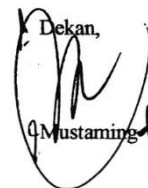
Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018

Dekan


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Djihan Patarioja
 NIM : 15 0302 0002
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan UU RI
 Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Mabonta Kecamatan Burau
 Kabupaten Luwu Timur).
- III Tim Dosen Penguji :
 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 3. Penguji I : Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
 4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 29 Oktober 2018

Dekan,

 Dr. Mustaming

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul

IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Kasus Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)

Daftar Pertanyaan:

1. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
 - a. Bagaimana usaha Kepala Desa selama masa jabatannya dalam melaksanakan ke empat bidang tugasnya selaku Kepala Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa?
 - b. Apa saja yang telah Kepala Desa programkan dalam melaksanakan tugas?
 - c. Bagaimana tanggapan BPD, Tokoh masyarakat dan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa?
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa pasti ada faktor-faktor yang menghambat, faktor apa saja itu?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMANSI
Nis :
Alamat : Desa Mabonta
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa,

Nama : Djihan Patarioja
NIM : 15 0302 0002
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mabonta, 21 - Desember - 2018

Yang membuat pernyataan


Hamansi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISWAR
Nis :
Alamat : Desa Mabonta
Jabatan : Ketua BPD

Menerangkan bahwa,

Nama : Djihan Patarioja
NIM : 15 0302 0002
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mabonta, 21-Desember- 2018

Yang membuat pernyataan



ISWAR

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKIB**
Nis : -
Alamat : **MABONTA**
Jabatan : **MASARAKAT**

Menerangkan bahwa,

Nama : Djihan Patarioja
NIM : 15 0302 0002
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mabonta, 21 - Desember-2018

Yang membuat pernyataan


AKIB

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAHRI

Nis :

Alamat : DESA MABONTA

Jabatan : TOKOH MASYARAKAT

Menerangkan bahwa,

Nama : Djihan Patarioja

NIM : 15 0302 0002

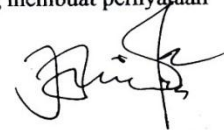
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mabonta, 21 Desember 2018

Yang membuat pernyataan



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Mabonta



Wawancara dengan Ketua BPD Mabon



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat Desa



Rapat Penyerahan Dana BUMDES



Rapat Penyerahan Tunjangan Aparat Desa